

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini semakin pesat perkembangannya dan banyak mempengaruhi hal-hal dari berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, politik, pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Saat ini aspek teknologi menjadi salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan, banyak sekali kemudahan yang dapat diakses dengan menggunakan teknologi. Pemanfaatan teknologi di Indonesia juga sangatlah besar, salah satu yang dapat dilihat adalah dari aspek ekonomi dengan pola perdagangan atau sektor bisnis yang kini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi kini telah dapat menempatkan posisinya dengan strategis karena telah mewujudkan dunia tanpa ruang, batas, jarak dan waktu yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Segala sarana dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah pola kehidupan masyarakat yang berkembang dan mendorong terjadinya perubahan tatan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan cara penegakan hukumnya. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah dimanfaatkan sebaik mungkin dalam kehidupan masyarakat dan telah memasuki segala sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, pendidikan, bisnis, perbankan, kesehatan dan kehidupan pribadi.¹

Saat ini dengan adanya teknologi informasi dan teknologi yang semakin canggih disegala kegiatan dan usaha manusia terasa mudah karena dengan munculnya teknologi. Manfaat teknologi kini tak hanya dirasakan masyarakat dalam bidang teknologi informasi saja, namun seluruh lapisan masyarakat di dunia juga merasakan manfaat tersebut. Salah satu bidang yang secara nyata mendapat manfaat secara langsung dari adanya teknologi adalah

¹ Siswanto surnaso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus : Prita Mulyasari*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2009), h.39

perekonomian. Hal itu dapat dilihat secara jelas bahwa dari pola persaingan perdagangan atau bisnis yang terjadi. Banyak sekali pelaku bisnis yang sudah melakukan inovasi atau bahkan berpindah haluan dari melakukan pemasaran dan penjualan secara biasa tanpa teknologi kini beralih melakukan proses pemasaran dan penjualan dengan cara menggunakan media teknologi yang mudah tanpa dapat memakan banyak ruang, waktu dan tenaga.

Pesatnya perkembangan teknologi dan internet ini juga tidak hanya merambah pada industri perekonomian saja namun juga pada industri keuangan khususnya di Indonesia. Melesatnya teknologi juga ditandai dengan munculnya *financial technology (fintech)*. Berkembangnya *Financial technology* juga mempengaruhi banyak perusahaan *Starup* yang mengeluarkan produk keuangan digital atau dalam kata lain uang elektronik atau *Electronic Money (e-money)*.

Uang adalah sebagai alat tukar yang sudah dipakai oleh masyarakat untuk menukarkan barang atau jasa yang ingin didapatkan dengan cara membayar langsung dimuka atau *cash* dengan adanya *electronic money* sebagai salah satu instrumen pembayaran *non-cash* yang diharapkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran yang cepat, mudah, dan relatif murah. Penggunaan *e-money* ini didapuk sebagai alternatif untuk mengurangi perkembangan penggunaan uang *cash*.

Sejak sekitar tahun 1990 masyarakat sudah banyak yang menggunakan fasilitas uang elektronik ini seperti debit cards, internet banking, dan automatic teller machine (atm) cards. Perkembangan inovasi kini masih berkembang dan uang elektronik juga muncul dalam bentuk smart cards, yaitu sebuah kartu yang menggunakan chip.²

Uang elektronik atau *Electronic money, e-money* adalah alat tukar atau alat pembayaran elektronik prabayar yang mana didalamnya terdapat nilai uang tertentu, dapat menyimpan dan diisi ulang dengan media chip atau server yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh suatu perbankan atau lembaga non bank

² Rahmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran", *Yuridika Journal*, Vol.32, No.1 (Surabaya, 2017), h.135.

untuk memaksimalkan alat pembayaran non tunai (*less cash*) agar terciptanya *cash less society*.

Uang elektronik sebagai alat pembayaran alternatif non tunai menunjukkan adanya kenaikan potensi untuk mengurangi tingkat penggunaan uang *cash*. Uang elektronik ini menawarkan transaksi yang praktis, mudah, dan nyaman khususnya untuk transaksi bernilai kecil (*micro payment*), karena dalam penggunaan uang elektronik transaksi yang dilakukan dapat lebih mudah serta menjamin kecepatan dan keamanan transaksi baik bagi konsumen dan pedagang. Bentuk-bentuk uang elektronik antara lain berupa kartu fisik seperti kartu berchip, bentuk uang elektronik ini biasanya disediakan atau diterbitkan oleh layanan perbankan atau lembaga non perbankan, dan bentuk uang elektronik berbasis server seperti *e-wallet*, Gopay, Ovo, Shopeepay dan lain-lain, bentuk uang elektronik berbasis server ini biasanya disediakan atau diterbitkan oleh perusahaan jasa keuangan, non keuangan berbasis teknologi informasi atau provider telekomunikasi. Karakteristik uang elektronik ini berbeda dengan dengan sistem pembayaran elektronik sebelumnya seperti *internet banking*, kartu kredit atau kartu debit. Transaksi yang dilakukan dengan uang elektronik ini tidak terikat dengan rekening nasabah yang ada di bank, karena nilai nominal uangnya telah terekam dalam suatu alat atau sistem pembayaran yang digunakan.

Penggunaan uang elektronik ini sudah banyak diterapkan dan didukung oleh gerai perbelanjaan atau merchant, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi dengan uang elektronik. Hal ini juga dilakukan untuk mengimplementasikan rancangan program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Untuk mendukung gerakan *less cash society* ini, Bank Indonesia bersama dengan instansi-instansi terkait dan pelaku sistem pembayaran Indonesia telah mengadakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan instrument pembayaran non tunai. Sehingga dapat membentuk

suatu kumpulan masyarakat yang banyak menggunakan transaksi non tunai dalam kegiatan ekonominya, karena kegiatan ini mampu menekan pengeluaran anggaran untuk mencetak uang setiap tahunnya.³ Bank Indonesia mencatat kenaikan transaksi uang elektronik pada akhir tahun 2018 naik dari angka 209,8 persen atau 2,9 Miliar transaksi dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 943,3 juta transaksi. Pada Juli 2019 jumlah transaksi uang elektronik mencapai 2,7 Miliar transaksi, mendekati angka akhir tahun 2018. Pada Juli 2019 nilai transaksi uang elektronik sebesar 69 Triliun melampaui nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2018. Adapun rata-rata kenaikan transaksi uang elektronik dari tahun 2008 sampai 2019 adalah sebesar 2,8 Miliar atau mencapai Rp. 140.000.000.000 (Seratus Empat Puluh Triliun Rupiah).⁴

Setelah diadakannya transaksi uang elektronik di Indonesia diperlukan adanya peraturan yang mengatur kegiatan transaksi yang dilakukan, yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan transaksi uang elektronik. Hal ini berkaitan dengan legalitas transaksi yang dilakukan, karena pada pelaksanaannya kegiatan transaksi uang elektronik memiliki resiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan sistem pembayaran.

Tujuan BI menerbitkan penagaturan uang elektronik adalah untuk mengatur tata cara perizinan dan peralihan perizinan dan penyelenggaraan, pengawasan, peningkatan keamanan dan sanksi ketentuan-ketentuan keseluruhan terkait uang elektronik. Pada tanggal 13 April 2009 Bank Indonesia mengeluarkan pengaturan mengenai uang Elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Peraturan Bank Indonesia

³ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", *Muslim Heritage Journal*, Vol.3, No.1, (Ponorogo, 2018), h.24.

⁴ Dwi Hadya Jayani, Transaksi Uang Elektronik Melonjak 209,8% pada 2018, dalam *berita databoks*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/23/transaksi-uang-elektronik-melonjak-2018-pada-2018>, Diakses pada 23/11/2019, Pukul 15.50 WIB.

No. 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Elektronic Money*). Dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DSAP perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*).⁵

Di Indonesia sendiri sudah terdapat banyak penyedia uang elektronik baik berbentuk kartu fisik ataupun berbasis server yang menerbitkan berbagai inovasi uang elektronik. Hingga Maret 2019 tercatat ada 37 perusahaan yang menerbitkan uang elektronik.⁶ Salah satu perusahaan yang sekarang banyak digunakan masyarakat Indonesia dibidang uang elektronik ini adalah aplikasi OVO.

Aplikasi alat pembayaran elektronik OVO ini dapat digunakan di merchant-merchat seerti dibeberapa department store seperi Hypermart, Matahari, dan berbagai macam merchant-merchant pedangang bermerk maupun para pelaku UMKM maupun UKM. Pembayaran OVO dapat digunakan hanya dengan mengakses aplikasi OVO di *Smart phone*. Dengan menggunakan aplikasi OVO dinilai dapat mempermudah dan mempersingkat waktu transaksi, costumer dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan cepat tanpa harus membawa uang *cash* ataupun kartu berchip. Dalam penggunaanya costumer tidak memerlukan waktu untuk menerima uang kembalian karena saldo dalam akun OVO akan secara otomatis terpotong sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan.

OVO adalah aplikasi pembayaran elektronik yang resmi pada Maret 2017.⁷ Aplikasi OVO adalah platform yang menggnakan media transaksi dan melakukan pembayaran dengan metode elektronik atau secara digital yang

⁵ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/pages/default.aspx>, diakses pada 23/11/2019, Pukul 18.46 WIB.

⁶ Ada 37 Uang Elektronik yang Ada di Indonesia, dalam berita Kompas, www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2019/03/23/063000326/ada-37-uang-elektronik-yang-ada-di-indonesia-apa-saja, diakses pada 23/11/2019, Pukul 18.59 WIB.

⁷ *Ovo Targetkan Jadi Alat Pembayaran Nomor Satu*, dalam kabar media Berita Satu, <http://id.beritasatu.com/telecommunication/ovo-targetkan-jadi-alat-pembayaran-nomor-satu>, diakses pada 26/11/2019 Pukul 21.29 WIB.

didalamnya terdapat saldo OVO *Cash*. OVO *Cash* adalah sejumlah atau dana elektronik (*e-money*) yang dapat diakses melalui aplikasi OVO yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan, seperti pembayaran di berbagai merchant, isi ulang (*top-up*) dan pengecekan saldo.⁸

Aplikasi OVO terbagi menjadi dua kategori system yang berbeda yaitu yaitu OVO *Primer* dan OVO *Club*. OVO *Primer* adalah klasifikasi keanggotaan OVO dengan akun yang teregistrasi dan anggota dapat melakukan transaksi keuangan seperti melakukan penarikan tunai, transfer dana, dan transaksi keuangan lainnya. Sedangkan, OVO *Club* adalah klasifikasi layanan keuangan yang tidak teregistrasi, yaitu layanan yang ketika *costumer* melakukan pengisian saldo, *costumer* tidak dapat melakukan penarikan tunai dan hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada *merchant*.

Perbedaan layanan pada aplikasi OVO ini mempunyai perbedaan yang sangat jelas, tidak sedikit dari pengguna OVO merasa dirugikan karena karena layanan yang disediakan oleh OVO terutama bagi pengguna OVO *Club* khususnya para pengguna baru OVO karena para pengguna baru OVO ini tidak diberi penjelasan bahwa pengguna adalah pengguna uang elektronik unregistered (tidak teregistrasi). Para pengguna tidak diberi pemahaman mengenai klausul-klausul mengenai system dan status keanggotaan pengguna yang melakukan pendaftaran melalui aplikasi, sehingga pengguna aplikasi merasa dirugikan oleh pihak penyedia layanan.

Dalam hukum perjanjian istilah klausula baku termakstub dalam UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa klausula baku adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam syariah, peraturan yang digunakan di Indonesia mengacu pada Fatwa DSN MUI baik masalah biasa maupun masalah kontemporer diatur dalam Fatwa DSN MUI. Fatwa merupakan jawaban bagi permasalahan

⁸ <https://www.ovo.id/faq> diakses pada 26/11/2019 Pukul 21.59 WIB.

hukum yang dilihat dari segi kesyariahan yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'.

OVO merupakan salah satu aplikasi pembayaran yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam seharusnya sesuai dengan Fatwa agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Jika banyak penyimpangan dalam transaksi OVO dari fatwa, di khawatirkan akan banyak unsur-unsur kemudharatan didalamnya. Untuk melindungi konsumen beragama Islam, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan suatu Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah yaitu Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, terdapat hal menarik yang perlu dibahas dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dari latar belakang tersebut dengan judul *“Analisis Produk Uang Elektronik OVO Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”*

B. Rumusan Masalah

OVO adalah salah satu platform pembayaran elektronik yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi pada zaman modern ini. Namun, pada pelaksanaannya banyak pengguna OVO khususnya pengguna baru atau anggota OVO Club yang merasa dirugikan karena tidak adanya klausul yang jelas bagi sistem dan status bagi pengguna baru sehingga saldo pengguna berstatus OVO Club tidak dapat menarik uang mereka atau dalam hal ini adalah hak konsumen.

Oleh karena itu, penulis memiliki beberapa pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembayaran dalam aplikasi OVO?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan aplikasi OVO?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan aplikasi OVO.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembayaran menggunakan aplikasi OVO.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pembelajaran kepada para pihak yang akan melakukan penelitian di bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait produk aplikasi *e-money* OVO.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis guna memperluas wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme dan pelaksanaan pembayaran menggunakan aplikasi OVO dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang uang elektronik yang bercorak syariah. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif untuk dapat memajukan kegiatan usaha demi kelangsungan hidup umat yang sejahtera.

E. Studi terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terkait uang elektronik syariah oleh para akademisi. Penulis mencari data dan memahami penelitian yang telah dilakukan untuk menghindari kesamaan dalam meneliti uang elektronik syariah dengan peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut:

1	Judul Skripsi	Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Gojek Menurut Pendapat Ulama di Media
---	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Sosial
	Identitas	Wienda Fitri Rahayu, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
	Kesimpulan	Dari penelitian ini dapat disimpulkan adanya perbedaan pandangan para Ulama namun secara garis besar hamper mendekati dan sesuai dengan fatwa. Hanya ada yang kurang tepat antara akad yang digunakan dengan metode pembayaran pada gojek. ⁹
	Pembeda	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pendapat para Ulama tentang pembayaran jual beli barang dan jasa yang diterapkan di aplikasi Gojek, dan apakah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan penulis, akan melakukan penelitian dengan memfokuskan keseuaian produk uang elektronik OVO dengan meninjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah.
2	Judul Skripsi	Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi'iyah (Studi Aplikasi OVO)
	Identitas	Amir Faqih, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
	Kesimpulan	Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa

⁹ Wienda Fitri Rahayu, *Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Gojek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial*, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,(Jakarta,2019). h.87.

		produk pada aplikasi OVO belum sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang baik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan, sedangkan dalam pandangan ulama Syafi'iyah kurang sesuai dengan prinsip syariah karena pengguna tidak bisa mengambil haknya. ¹⁰
	Pembeda	Penelitian ini lebih banyak menekankan dan memfokuskan pada hukum positif tentang pemberitahuan klausula dalam aplikasi OVO. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian dengan memfokuskan kesesuaian produk uang elektronik OVO yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
3	Judul Jurnal	Kedudukan Hukum Uang Elektronik (e-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam)
	Identitas	Linda Nur Hasanah, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
	Kesimpulan	Dalam penelitian ini uang elektronik hukumnya sah sebagai transaksi pembayaran untuk transaksi tunai karena uang elektronik telah mempunyai dasar

¹⁰ Amir Faqih, *Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi'iyah (Studi Aplikasi OVO)*, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, (Surabaya, 2018), h.83.

		hukum yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan menurut hukum Islam uang elektronik boleh digunakan karena memudahkan dan memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. ¹¹
	Pembeda	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang elektronik sebagai alat pembayaran di Indonesia dan dalam pandangan Islam apakah sah penggunaan uang elektronik ini sebagai alat transaksi jual beli. Penelitian ini terfokus pada kedudukan transaksi yang dilakukan pada uang elektronik yang ditinjau dengan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan, penulis akan melakukan penelitian terkait kesesuaian pelaksanaan pembayaran elektronik melalui aplikasi OVO yang ditinjau dengan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam adalah sebutan istilah yang sangat populer di Indonesia, sedangkan di Dunia internasional lebih dikenal dengan *al-iqtishad al-Islami* atau *Islamic Economic*. Ekonomi Islam biasanya banyak dikaitkan dengan ekonomi yang berlandaskan asas-asas Islami, asas Ilahiyah, ekonomi yang menggunakan prinsip bagi hasil, atau ekonomi yang menggunakan asas keadilan, keseimbangan dan lain sebagainya. Seiring majunya perkembangan zaman, maka ekonomi Islam pun makin dikenal dan

¹¹ Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (e-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam)*, dalam Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang, 2018).h.xvii.

semakin berkembang baik dari segi pelaksanaan, maupun hukum-hukumnya. Konsep ekonomi Islam mengusung syariat yang mempunyai tujuan dalam mewujudkan kemashlahatan ummat di dunia dan akhirat.

Maqashid al-Syariah menurut bahasa terdiri dari kata *maqashid* dan *al-syariah*, *Maqashid* merupakan jamak dari kata *maqasid* yang berarti tujuan, sedangkan *al-Syariah* merupakan kata subjek dari kata *Syara'* yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. *Maqashid al-Syariah* yaitu bertujuan untuk menciptakan *mashlahat* dan menghilangkan *mafsadat*. Dalam kitab *al-Muwafaqat* Imam as-Syathibi ada 5 bentuk *maqashid al-Syariah* yaitu *Kulliat al-Khamsah* (lima prinsip umum).

- a. *Wad'u al-Syari'ah* yaitu Syariah yang bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan hamba.
- b. *Wad'u al-Syariah lil ifham* yaitu syariat yang dipahami, Al-Qur'an yang turun dengan Bahasa Arab dengan ketentuan yang mudah dipahami secara benar.
- c. *Dukhul Mukhallaf tahta ahkami syar'iah* yaitu cakupan taklif, setiap manusia mukhallaf menjadi bagian dari objek hukum tanpa ada pengecualian dan tidak diskriminasi.
- d. *Wad'u al-Syariah litaklif* yaitu substansi taklif dengan memberikan ketentuan (taklif) Islam itu sesuai dengan kemampuan manusia.¹²

Adapun kelima *maqashid* tersebut yang dimaksud As-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* adalah:

- a. *Hifdzu al-Din* (melindungi Agama)
- b. *Hifdzu al-Nafs* (melindungi jiwa)
- c. *Hifdzu al-Aql'* (melindungi akal)
- d. *Hifdzual-Mal* (melindungi harta)
- e. *Hifdzu al-Nasb* (melindungi keturunan).¹³

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.120.

Maqashid al-Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan-tujuan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma para ulama sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan umat.¹⁴ Maka tujuan Islam dari segi muamalah dapat dilihat dalam rangka menjaga *mukhallaf* terhadap harta mereka *hifdzu al-mal*, untuk menghindari dari dirugikan oleh oranglain, dan dapat memanfaatkan harta miliknya untuk kelangsungan hidup mereka. Pada asalnya segala bentuk muamalah itu boleh kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan transaksinya, hal ini terdapat dalam suatu kaidah fiqh yang khusus dalam bidang muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah itu adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.”¹⁵

Maksud kaidah tersebut adalah menyebutkan bahwasannya segala transaksi dalam muamalah itu adalah diperbolehkan, baik jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Kebolehan ini menjadi terhalang apabila dalam transaksi tersebut terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan seperti adanya unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, sehingga setiap transaksi muamalah harus berdaarkan prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam fiqh.

Prinsip muamalah terdiri dari 4 bagian yaitu:

- a. Pada dasarnya muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.
- b. Muamalah hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka.
- c. Muamalah hendaknya membawa kemashlahatan dan menolak kemudharatan.

¹³ Oni Syahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Isla*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.4-5.

¹⁴ Nurhadi, “Maqashid Ammah dan Khassah Operasional Bank Syariah”, *Ekonomi Islam Journal*, Vol.9. No.2, (Pekanbaru,2018), h.156.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.128.

- d. Dalam muamalah harus lepas dari *riba*, *maysir*, *gharar*, dan unsur yang diharamkan oleh syara'.¹⁶
- a) *Riba* adalah penambahan nilai atau melebihi harta ribawi yang sejenis yang dipertukarkan serta adanya penangguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai.
- b) *Maysir* adalah akad untung-untungan atau undian yang berarti mudah karena harta diperoleh tanpa susah payah, seperti judi, spekulasi atau sesuatu yang dihitung secara tidak cermat.
- c) *Gharar* adalah suatu akad yang mengandung ketidak pastian, baik dari segi objek, subjek maupun shigat atau akadnya.¹⁷

Terkait perkembangan zaman dan teknologi masyarakat kini cenderung menggunakan alat tukar elektronik atau uang elektronik (e-money). Uang elektronik sendiri adalah alat tukar atau alat pembayaran dengan elemen digital, selain itu kini banyak lembaga syariah yang mengeluarkan produk uang elektronik syariah yang menggunakan akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *wakalah bil ujah*, akad *wadi'ah*, akad jual beli.

Dasar Hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk bertransaksi elektronik adalah sendiri yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Al-Maidah [5]:1).¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁶ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.130.

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.59,69,226.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.106.

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Nisa [4]:29)¹⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مَنَّكَ
وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه أبو داود والترمذي والحكام)

“Serahkanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim.)²⁰

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Menurut Furchan penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur dan ketat, mengutamakan obyektifitas, dan dilakukan secara cermat. Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan.²¹ Sebagaimana dengan namanya, penulis berharap dengan menggunakan metode ini dapat menggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat mengenai transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik berbasis aplikasi OVO.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang

¹⁹ Ibid., h.83.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 286.

²¹ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h.54.

dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam hal ini, peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya. Peneliti bertindak sebagai pemakai data. Data sekunder dibagi menjadi dua kelompok menurut sumbernya, yaitu data internal yang tersedia ditempat penelitian dilakukan dan data eksternal yang merupakan data perolehan dari pihak luar.²² Sumber penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diambil adalah syarat dan ketentuan dari aplikasi OVO.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan sebagai informasi terkait penelitian yang akan penulis lakukan. Dapat berupa jurnal, majalah, surat kabar, buku bacaan, skripsi, artikel, media internet, maupun data-data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang pengumpulannya tidak terpadu oleh teori, tetapi dipadu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian lapangan yaitu data yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diartikan juga sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat *Pospositivisme/interpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrument kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.²³

²² Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.69.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.347.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai bahan analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan atau yang sedang diteliti. Dengan melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan meneliti data-data, teori-teori dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, literatur, untuk mendapatkan teori terkait permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti data statistik, grafik, gambar-gambar, surat-surat, akte, dan foto-foto.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara ini penulis akan melakukan wawancara dengan para pengguna aplikasi OVO yang pernah merasa dirugikan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dapat dapat dirumuskan hipotesis penelitian seperti yang disarankan oleh

data.²⁴ Dengan data yang didapat untuk penelitian ini, penulis akan melakukan langkah-langkah penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan data dari teknik-teknik yang penulis lakukan, penulis melakukan pengumpulan data agar menjadi satu kesatuan data yang utuh.
- b. Menyeleksi data, dengan mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar sesuai dengan rumusan masalah yang telah direncanakan.
- c. Menghubungkan dan menganalisa antara teori, dan data kenyataan yang ada dilapangan.
- d. Menyimpulkan data sesuai dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini dapat dianggap sudah sesuai antara data hasil penelitian dengan teori yang digunakan.



²⁴ *Pengertian Metode Analisis Data Kualitatif*, dalam Penjelasan Blog Dapur Ilmiah, <http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html?m=1>, diakses pada 11/05/2019 pukul 14.57 WIB.